



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56/PERMEN-KP/2017  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MELALUI  
PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 271);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap.
3. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam jangka waktu tertentu.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

8. Unit Kerja adalah unit kerja eselon II atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian atau unit kerja eselon II atau unit pelaksana teknis daerah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan Penyesuaian/*Inpassing*, tata cara Penyesuaian/*Inpassing*, dan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

### BAB II

#### PERSYARATAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* harus berdasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.
- (2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 4

PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1)/Diploma IV;
- d. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. usia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir;

- g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap paling singkat 2 (dua) tahun dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang perikanan tangkap; dan
- h. mendapatkan persetujuan dari atasan langsung.

#### Pasal 5

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus:

- a. tidak sedang menjalani/dijatuh hukuman disiplin tingkat sedang atau berat pada masa Penyesuaian/*Inpassing*;
- b. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian/*Inpassing*; dan
- c. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada masa Penyesuaian/*Inpassing*.

### BAB III

#### TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*

##### Bagian Kesatu

Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap di Lingkungan Kementerian

#### Pasal 6

- (1) Pimpinan Unit Kerja mengidentifikasi PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diusulkan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.

- (3) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
- a. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - b. surat keterangan sehat dari dokter;
  - c. fotokopi ijazah terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam surat keputusan kepangkatan terakhir;
  - d. fotokopi penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - e. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
  - f. surat keterangan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa PNS tersebut:
    1. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
    2. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
    3. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara; dan
    4. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap paling singkat 2 (dua) tahun dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang perikanan tangkap; dan
  - g. surat persetujuan dari atasan langsung.
- (4) Pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap:
- a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan usulan beserta berkas yang dilampirkan sesuai dengan yang dipersyaratkan; dan

- b. tingkat pendidikan, golongan ruang, dan masa kerja kepangkatan terakhir, untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah lengkap, benar, dan sah, pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melakukan penilaian dengan memperhatikan tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.
- (6) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap menyampaikan usulan penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui Penyesuaian/*Inpassing* kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, tidak benar, tidak sah, dan/atau berdasarkan hasil penilaian tidak sesuai dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap mengembalikan usulan kepada pimpinan Unit Kerja, disertai dengan alasan.
- (8) Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 7

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), untuk PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Utama/Ahli Utama, Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian menyampaikan usulan penetapan kepada Presiden, disertai dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota

### Pasal 8

- (1) Pimpinan Unit Kerja mengidentifikasi PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diusulkan kepada sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
  - a. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - b. surat keterangan sehat dari dokter;
  - c. fotokopi ijazah terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam surat keputusan kepangkatan terakhir;
  - d. fotokopi penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - e. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;



- f. surat keterangan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa PNS tersebut:
    - 1. tidak sedang menjalani/dijatui hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
    - 2. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
    - 3. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara; dan
    - 4. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap paling singkat 2 (dua) tahun dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang perikanan tangkap; dan
  - g. surat persetujuan dari atasan langsung.
- (4) Sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap:
- a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan usulan beserta berkas yang dilampirkan sesuai dengan yang dipersyaratkan; dan
  - b. tingkat pendidikan, golongan ruang, dan masa kerja kepangkatan terakhir, untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah lengkap, benar, dan sah, sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota melakukan penilaian dengan memperhatikan tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.
- (6) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota menyampaikan daftar usulan untuk dimintakan pertimbangan teknis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian, dengan dilengkapi:
- a. data kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap di daerah provinsi atau kabupaten/kota; dan

- b. data dan hasil verifikasi administrasi PNS yang akan mengikuti Penyesuaian/*Inpassing*.
- (7) Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian melakukan verifikasi terhadap data dan hasil verifikasi administrasi PNS dengan data kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap di daerah provinsi atau kabupaten/kota, yang hasilnya berupa pertimbangan teknis.
- (8) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota sebagai bahan penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
- (9) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota menyampaikan usulan penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui Penyesuaian/*Inpassing* kepada Pejabat Pembina Kepegawaian daerah provinsi atau kabupaten/kota, disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (10) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, tidak benar, tidak sah, dan/atau berdasarkan hasil penilaian tidak sesuai dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota mengembalikan usulan kepada pimpinan Unit Kerja, disertai dengan alasan.
- (11) Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9), untuk PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Utama/Ahli Utama, Pejabat Pembina Kepegawaian daerah provinsi atau kabupaten/kota menyampaikan usulan penetapan kepada Presiden, disertai dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

#### Pasal 10

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian atau Pejabat Pembina Kepegawaian daerah provinsi atau kabupaten/kota menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui Penyesuaian/*Inpassing* dengan keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang bersangkutan melalui pimpinan Unit Kerja yang mengusulkan, dengan tembusan kepada:
  - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
  - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi/BKD kabupaten/kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
  - c. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
  - d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; dan
  - e. pejabat lain yang dianggap perlu.

(3) Bentuk dan format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian atau Pejabat Pembina Kepegawaian daerah provinsi atau kabupaten/kota menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui Penyesuaian/*Inpassing* paling lambat pada tanggal 31 Januari 2019.

#### Pasal 12

PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap melalui Penyesuaian/*Inpassing* selanjutnya ditempatkan dan diberikan penugasan sesuai dengan jabatannya.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2017

MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1720

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56/PERMEN-KP/2017  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP  
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

SURAT PERNYATAAN DAN SURAT KETERANGAN

A. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

SURAT PERNYATAAN  
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini,

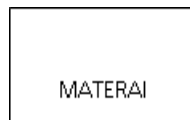
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T : .....  
Unit Kerja : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
2. tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya; dan
3. bertanggung jawab dalam menjalankan tugas Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
(tempat, tanggal)



Yang membuat pernyataan  
(.....)  
NIP.....

B. SURAT KETERANGAN DARI ATASAN LANGSUNG

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama .....

NIP .....

Unit Kerja .....

Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T .....

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa,

Nama .....

NIP .....

Unit Kerja .....

Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T .....

Yang bersangkutan:

1. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
2. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
3. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara; dan
4. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap paling singkat 2 (dua) tahun dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang perikanan tangkap. \*)

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

(tempat, tanggal)

Atasan Langsung

(.....)

NIP.....

\*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56/PERMEN-KP/2017  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP  
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

KEPUTUSAN  
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA  
NOMOR .....

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI  
PERIKANAN TANGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara  
..... NIP ..... jabatan ..... pangkat/golongan  
ruang ..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk  
diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan  
Tangkap melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen  
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2017 Nomor 6037);  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan  
Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 271);  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2017  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional  
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : mengangkat:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....  
Terhitung mulai tanggal ..... disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan  
Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap jenjang .....  
dengan angka kredit sebesar ..... (.....)

KEDUA : ..... \*\*)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan  
ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana  
mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang  
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
2. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;\*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

